FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008-2013

SKRIPSI

Oleh:

Nama	: Ahmad Rifa'i
Nomor Mahasiswa	: 12313060
Jurusan	: Ilmu Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008-2013

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

Gunamemperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1 Jurusan Ilmu Ekonomi

Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama	: Ahmad Rifa'i
NomorMahasiswa	: 12313060
Jurusan	: Ilmu Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

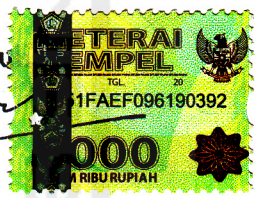
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti yang dimaksud dalam pedoman penulisan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku".

Yogyakarta, 16 Oktober 2016

Penu



Ahmad Rifa'i

PENGESAHAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008-2013

Nama : Ahamd Rifa'i

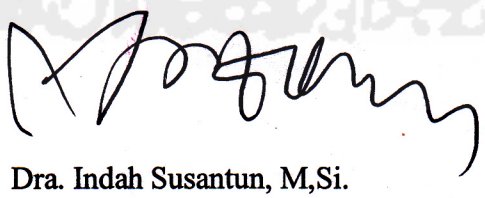
Nomor Mahasiswa : 12313060

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 13 Oktober 2016

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Dra. Indah Susantun, M,Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Disusun Oleh : **AHMAD RIFA'I**

Nomor Mahasiswa : **12313060**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 16 November 2016

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Indah Susantun, Dra., M.Si. .....

Penguji : Sarastri Mumpuni R, Dra., M.Si .....

Akhsyim Afandi, Drs., MA., Ph.D. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu,maka ia akan berada di jalan Allah sampai ia kembali

(HR, Tirmidzi)

Imam Syafi'i

Tidak akan diperoleh ilmu kecuali dengan enam perkara :

1. *Kecerdasan*
2. *Semangat*
3. *Bersungguh sungguh*
4. *Kerelaan hati mengeluarkan uang*
5. *Berasahabat dengan guru*
6. *Memerlukan waktu yang lama*

Seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, Apalagi perbuatan

(Pramoedya Ananta Toer)

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena ataskarunia ilmu, rahmat serta hidayahnya skripsi dengan judul **"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008-2013"** ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia yaitu Ad-Din Al-Islam yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak Dr. D. Agus Hardjito, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Dra, Indah Susantun.,Msi., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan dorongan dalam menyelesaikan penyusunanskripsi.

3. Seluruh Dosen dan Staf karyawan UII Yogyakarata yang telah mewariskan ilmunya kepada kami dengan tulus.
4. Kepada orang tuaku yang selalu mendukung baik do'a maupun secara materi yang tak bisa terukur ketulusannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang merupakan karya bhaktiku kepada orang tua dan keluarga yang sangat saya cintai
5. Kepada kakak dan adik tercinta yang telah memberikan berbagai dukungan kepada saya terutama do'a di sepertiga malam kalian.
6. Teman- teman jurusan ilmu ekonomi FE UII, terimakasih atas sumbangan saran, pemikiran-pemikiran dan motivasi serta semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini Semoga amal baik kalian dapat menjadi kebaikan untuk hari yang akan datang.
7. Kepadateman–teman LDF JAM FE UII, BLIZTMA YOGYAKARTA, 8 OTHERS, KONTRAKAN QQ yang sangat saya cintai dan juga terima kasih telah berbagi ilmu,semoga segala ilmu yang telah diperolehakan dapat bermanfaat kelak. Semoga kelak kita bias berkumpul lagi di kota yang selalu kita rindukan JOGJA ISTIMEWA.
8. Kepada teman-teman PPK ADVENTURE yang telah memberikan sebuah pengalaman baru dalam hidup berpetualang, kebersama mengajarkan kita semua arti persahabatan yang tak terbatas, terimakasih teman berkat kalian kini aku tau arti kebersamaan. Semoga kelak kita bisa berkumpul kembali di kota penuh kenangan YOGYAKARTA.

9. Serta semua pihak yang tidak mungkin kami sebut satu per satu, tanpa bermaksud untuk mengurangi rasa terima kasih penulis kepada kalian semua.

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang sempurna kecuali Allah SWT, begitu pun dengan skripsi ini.Oleh karena itu, dengan senang hati penulis mengharap kritik serta saran agar dapat menjadikan pembelajaran bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya.Dan harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 14 September 2016

Ahmad Rifa'i

NIM : 12313060

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....i

Halaman Judul Skripsi……...ii

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme iii

Halaman Pengesahan.....iv

Halaman Berita Acara Ujian Tugas Akhir/Skripsi……v

Halaman Motto vi

Kata Pengantar.....vii

Daftar Isi x

Daftar Tabel xiii

Daftar Gambar xiv

Abstraksi.....xv

Bab I : PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang.....1

1.2. Rumusan Masalah 7

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

1.4. Sistematika Penulisan.....9

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....10

2.1. Kajian Pustaka 10

2.2. Landasan Teori 17

2.2.1. Indeks Pembangunan Mannusia.....17

2.2.2.Dana Perimbangan 18

2.2.3. Belanja Modal 20

2.2.4. Produk Domestik Regional Bruto 21
2.2.5. Pendapatan Asli Daerah 25
2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian 27
2.3. Hipotesis Penelitian 28
BAB III : METODE PENELITIAN 29
3.1. Variabel penelitian dan Definisi Operasional 29
3.1.1. Variabel Independen (Y) 29
3.1.2. Variabel Dependen (X) 30
3.1.3. Populasi dan sampel 31
3.2. Metode Analisis Data 31
3.2.1. Data Panel 31
3.2.2. Model Penelitian 32
3.2.3. Estimasi Regresi Data Panel 33
3.2.4. Uji Kesesuaian Model 35
3.2.4.1. Uji *Chow* 35
3.2.4.2. Uji *Hausman* 36
BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 38
4.1.Analisis Deskripsi Data 38
4.2.Pemilihan Model Regresi 44
4.3. *Likelihood Ratio Test* (*Chow Test*) 44
4.4. Hasil *Uji Hausman* 45
4.5. *Estimasi Fixed Effect Model* 46
4.6. Analisis Hasil Regresi 48

4.6.1. *Fixed Effect Model* 48
4.6.2. Uji F (Uji secara menyeluruh) 49
4.6.3. KoefesienDeterminasi (R^2)… 50
4.7. Interprestasi Hasil Penelitian 50
4.7.1. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap IPM 50
4.7.2. Pengaruh Belanja Modal terhadap IPM 51
4.7.3. Pengaruh PDRB terhadap IPM 51
4.7.4. Pengaruh PAD terhadap IPM 52
BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 55
5.1. Kesimpulan 55
5.2. Keterbatasan Penelitian 57
5.3. Saran 58
5.3.1. Saran untuk pemerintah 58
5.3.2. Saran untuk peneliti selanjutnya 58
Daftar Pustaka 59
Lampiran 62

DAFTAR TABEL

1.1. Indeks Pembangunan Manusia di Lima Kabupaten/Kota 4

4.1. Tingakat Presentase IPM di Lima Kabupaten/Kota 41

4.2. Tingakat Dana Perimbangan di Lima Kabupaten/Kota.....42

4.3. Realisasi PAD di Lima Kabupaten/Kota 43

4.4. Tingakat PDRB di Lima Kabupaten/Kota.....45

4.5. Hasil Pengujian *Likelihood Ratio Test* 47

4.6. Hasil Pengujian *Hausman Tes*t.....48

4.7. Hasil Estimasi *Fixed Effect*.....49

4.8. Hasil Uji F dari Estimasi *Fixed effect* 51

4.9. Hasil Koefesien Determinasi Berdasarkan Estimasi *Fixed effect*……52

4.10. Perbedaan Koefisiensi Kabupaten/Kota DIY…….55

DAFTAR GAMBAR

1.1. Gambar Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Indonesia 2008-20013…6

2.1. Gambar Kerangka Pemikiran Penelitian……27

4.1. Gambar Nilai PDRB per Kapita DIY (rupiah) 2009-2013**.....** ….....44

ABSTRAKSI

Indeaks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari tiga komponen yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Penelitian bertujuan untuk menganalisa apakah variabel independen yang terdiri atas Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pendapatan Perkapita (PDRB), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap tingkat IPM pada kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2013.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan runtun waktu (*time series*) selama enam tahun dari tahun 2008-2013 dan *cross section* sebanyak lima kabupaten/kota di provinsi DIY yang diperoleh dari laporan ralisasi APBD DJPK Departemen Keuangan dan publikasi BPS.

Hasil regresi menggunakan metode data panel *Fixed effect model* diketahui bahwa variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, variabel Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM pada kabupaten/kota di provinsi DIY.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Dana Perimbangan, Belanja Modal, PDRB, Dan PAD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dimasa pergantian era reformasi pembangunan manusia merupakan hal pokok yang harus dilakukan oleh pemerintah di Indonesia, bahkan tidak hanya di Indonesia di negara-negara lainpun mempunyai kebijakan tersendiri dalam pembangunan manusia, hal ini karena pembangunan manusia menjadi prioritas peran pemerintah untuk menuju negara yang maju dalam segala aspek terutama pada sumber daya manusia. Dengan diterapkannya sistem otonomi daerah sejak 1 Januari 2001 diseluruh Dati II (Kota dan Kabupaten) membuat pemerintah mengubah sistem pemerintahan menjadi desentralisasi.

Kebijakan desentralisasi telah diterapkan dalam manajemen pemerintahan Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir setelah sebelumnya kebijakan sentralisasi mendominasi manajemen pemerintahan. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah lebih banyak berperan dalam pembangunan karena mereka kini memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengembangan masyarakat di wilayah yurisdiksinya. Karena pemerintah lokal dinilai memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi warga masyarakatnya, maka proses pembangunan dalam model kebijakan desentralisasi seharusnya menjadi

lebih efisien daripada model kebijakan sentralisasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

DiIndonesia kebijakan desentralisasi sesungguhnya sudah dimulai sejak lama, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1945 tentang pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Namun kebijakan desentralisasi di Indonesia memang baru dimulai sejak 1 Januari 2001, yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004.

Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah telah menjadi pemainutama dalam pembangunan didaerah, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pada pasal ke 14 bahwa salah satu urusan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota ialah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan,dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.Pada dasarnya UU No. 32 tahun 2004 dikeluarkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah karena tiap daerah memiliki potensi berupa sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang beraneka ragam. Lalu muncul permasalahan yang kompleks antar pemerintah daerah dalam

hal pendanaan biaya pembangunan, karena tiap daerah tidak cukup untuk memenuhi biaya pembangunan jika hanya mengandalkan sumber keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada akhirnya pemerintah akan melakukan transfer dana. Transfer dana ini berupa dana perimbangan. Dana perimbangan adalah pengeluaran alokatif anggaran pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. Kuncoro (2007) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Dana perimbangan bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). UU No. 33 tahun 2004 tentang "Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah" menyebutkan bahwa ketiga komponen dalam Dana Perimbangan merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan utuh. Berikut adalah data dari Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota provinsi DIY dari tahun 2008-2013.

Table 1.1

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2008-2013

Kab/Kota	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kota Yogyakarta	78,95	79,28	79,52	79,89	80,24	80,51
Kulon Progo	73,26	73,77	74,49	75,04	75,33	75,95
Bantul	73,38	73,75	74,53	75,05	75,51	76,01
Gunung Kidul	70,00	70,17	70,45	70,84	71,11	71,64
Sleman	77,24	77,07	78,02	78,79	79,39	79,97

Sumber : BPS, DIY Dalam Angka

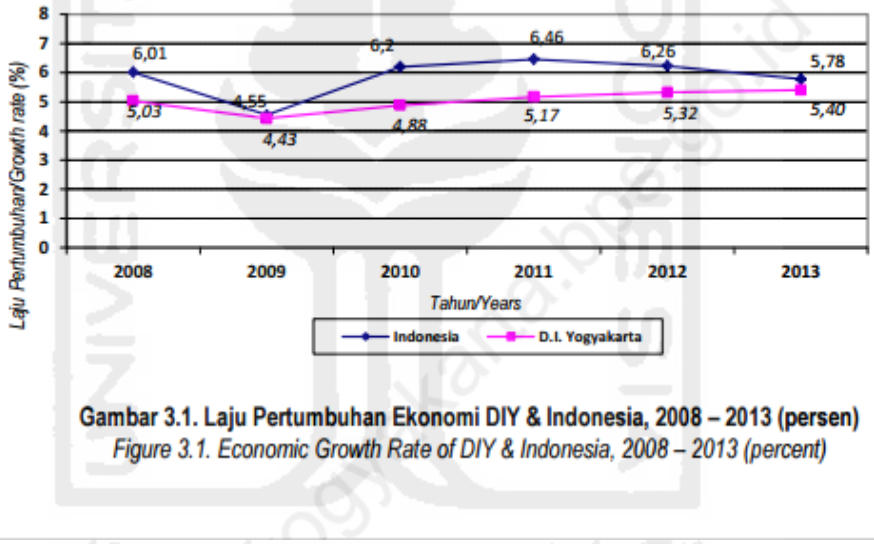
Dalam Tabel 1.1, dari data IPM tahun 2008 – 2013 pada kabupaten/ kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diketahui bahwa semuanya berada pada nilai antara 70,00 hingga 80,51. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada 5 kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta digambarkan dengan tabel di atas menunjukkan bahwa kabupaten dengan nilai IPM terendah adalah Kabupaten Gunung Kidul dengan nilai 70,00 pada tahun 2008, meskipun mengalami kenaikan setiap tahunnya akan tetapi belum mampu untuk menyusul nilai IPM 4 kabupaten/kota lainnya yang juga mengalami kenaikan. IPM tertinggi selalu dimiliki oleh kota Yogyakarta dengan nilai 80,51 pada tahun 2013. Pada table 1.1 diatas menjelaskan adanya kenaikan IPM untuk semua kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang artinya tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dalam hal kesehatan,pendidikan, dan daya beli.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses menuju perubahan yang diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro ialah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Tingginya pertubuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan kegiatan atau kinerja ekonomi daerah yang dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Todaro, 2006). Sedangkan menurut Arsyad (2004), pembangunan ekonomi

merupakan proses yang menyebabkan pendapatan nasional riil per kapita meningkat dalan waktu lama. Pembangunan ekonomi yang dilakuakan oleh suatu negara bertujuan untuk mewujudkan masyrakat yang sejahtera, makmur dan adil.

Gambar 1.1

Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Indonesia 2008-2013



Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi DIY & Indonesia, 2008 – 2013 (persen)

Figure 3.1. Economic Growth Rate of DIY & Indonesia, 2008 – 2013 (percent)

Sumber : DIY Dalam Angka

Dalam gambar 1.1 secara umum, kinerja perekonomian provinsi DIY meningkat selama periode 2008-2013. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04 persen per tahun, lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi DIY sempat melambat menjadi 5,03 persen di tahun 2008, akibat pengaruh krisis global. Kondisi ini mulai membaik seiring dengan pasca erupsi merapi ditahun 2010.

Hingga tahun 2013 pertumbuhan ekonomi DIY berangsur-angsur naik hingga mencapai 5,40 persen (Gambar 1.1)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator dalam pembangunan ekonomi, hal ini karena di dalam IPM terdapat beberapa komponen dasar yang antara lain; angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar kehidupan yang layak sehingga dapat menunjukan seberapa besar kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi di provinsi DIY pada khususnya. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut maka judul penelitian "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di DIY Tahun 2008-2013" dapat memberikan gambaran analisis tentang sejauh mana peran beberapa variabel tersebut dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia hasil kinerja pemerintah pusat melalui transfer dana perimbangan ke daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk untuk dilakukang penelitian. Yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY Tahun 2008 - 2013 ?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY Tahun 2008 - 2013?
3. Bagaimana pengaruh PRDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY Tahun 2008 - 2013 ?

4. Bagaimana pengaruh PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY Tahun 2008 - 2013?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY.
2. Menganalisis pengaruh belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY.
3. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY.
4. Menganalisis pengaruh PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Secara umum dalam penelitian ini menggunakan analisis kebijakan fiskal melalui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sehingga akan lebih untuk memahami strategi yang mempengaruhi perekonomian daerah. Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya:

a. Bagi Peneliti

   Peneliti dapat mengintrepestasikan penelitiannya, sehingga bermanfaat bagi peneliti untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan keilmuannya dan akan bermanfaat untuk penelitian yang akan datang.

b. Bagi Pemerinta daerah

Penulis berharap dari adanya penelitian ini pemerintah daerah dapat memaksimalkan penerimaan, pengeluarannya serta pengelolaanya secara efektif dan efesien, sehingga dalam pengalokasiaanya lebih meningkatakan kualitas hidup masyarakat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan Pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini bertisi tiga bagian: *pertama*, berisi pendokumentasian dan pengakjian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. *Kedua*, mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori ini berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori-teori yang didapat akan menjadi landasan bagi penulisan untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang penulis pilih. *Ketiga*, merupakan formalisasi hipotesis. Hipotesis ini dipandang sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah,

sehingga hipotesis yang disusun adalah merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian.Menguraikan tentang deskripsi data penelitian dan penjelasan tentang hasil dan analisis.

BAB V : SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi tentang dua hal yaitu, simpulan yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang langsung diturunkan dari seksi diskusi dan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya, dan implikasi penelitian yang berisi tentang hasil dari kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga dari sini dapat ditarik benang berah apa implikasi teoritas penelitian ini.

BAB II

Kajian Pustaka dan Landasan Teori

2.1. Kajian Pustaka

Demi memperkuat dalam melakukan penelitian ini. Penulis menggunakan peneliti terdahulu sebagai acuan dan referensi untuk mendukung dan mempermudah dalam menentukan variabel–variabel. Berikut merupakan penelitian terdahulu dalam penelitiannya :

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	MetodePenelitian serta Hasil dan Analisis
1	Lilis Setyowati dan Yohana Kus Suparwati Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusiadengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2009	Variabel depnden: Indeks Pembangunan Manusia Variabel independen: 1-Pertumbuhan Ekonomi 2-Dana Alokasi Umum 3-Dana Alokasi Khusus 4-Pendapatan Asli Daerah	Analisis regresi data panel hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa : -Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal -Dana Alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

			-Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifika terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal -Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal
2	Nizar Firmansah Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2009-2013	Variabeldependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabelindependen : 1-Dana Perinbangan 2-PertumbuhanEkonomi 3-Kemiskinan 4-Belanja Modal	Analisis regresi data panel hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa : -Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM -Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadapIPM -Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM -Kemiskinan berpengaruh negative dan signifikan terhadap IPM

3	Decta Pitron Lugastoro Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2006-2011	Variabeldependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabelindependen : 1-Pendapatan Asli Daerah 2-Dana Perimbangan	Analisis regresi data panel hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa : -Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM -Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM
4	Denni Sulistio mirza Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009	Variabeldependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabelindependen : 1-Pertumbuhan Ekonomi 2-Kemiskinan 3-Belanja Modal	Analisis regresi data panel hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa : - Kemiskinan berpengaruh negative dansignifikan terhadap IPM - Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh postif dan signifikan terhadap IPM - Belanja Modal berpengaruh postif dan signifikan terhadap IPM
5	Ginanjar Budhi Utomo Faktor- faktor penetu indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Yogyakarta tahun 2004-2013	Variabeldependen: Indeks Pembangunan Manusia Variabelindependen : 1-Dana Perinbangan 2- Pendapatanperkapita 3-Belanja Modal	Analisis regresi data panel hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa : -Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM -Pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM -Belanja modal tidak berpengaruh terhadap IPM

6	Putu Ayu Krisna Dewi I Ketut Sutrisna Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali tahun 2008-2012	Variabel dependen : Indeks Pembangunan Manusia Variabel independen : 1-Keuangan Daerah 2-Pertumbuhan Ekonomi	Analisis regresi data linier berganda dari penelitiannya menyebutkan bahwa : -Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IPM -Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IPM
7	Nur Baeti Pengaruh Penganguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011	Variabel dependen : Pembangunan Manusia Variabel independen : 1-Pengangguran 2-Pertumbuhan ekonomi 3-Pengeluaran Pemerintah	Analisis regresi data panel hasil dari penelitiannya menyebutkan bahwa : -Pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM -Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM -Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Lilis Setyowati Yohana Kus Suparwati (2012) yang berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAK, DAU, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di kabupaten/kota Jawa Tengah Tahun 2005-2009". Penelitian ini dilakukan untuk melihat

pengaruh masing-masing variable terhadap indeks pembangunan manusia.Estimasi model menggunakan metode data panel. Hasil estimasi data memberikan bukti bahwa variabelPertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Dana Alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Dana Alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, serta Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Nizar Firmansah (2015) melakukan penelitian menggunakan data panel di Jawa Tengah dengan 35 kabupaten/kota dan dalam kurun waktu 5 tahun (2009-2013), dengan variabel dependen ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan variabel independen antara lain: Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa variabel Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadapIPM, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Decta Pitron Lugastoro (2013) melakukan penelitian menggunakan data panel dengan *cross section* berjumlah 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dan *time series* tahun 2006-

2011 dengan menggunakan metode analisis *random effect model*. Variabel dependen yang digunakan adalah IPM, dan variabel independennya ialah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Hasil estimasi yang diperoleh penelitian ini adalah variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Denni Sulistio Mirza (2012) yang berjudul "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009". Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel terhadap indeks pembangunan manusia. Estimasi model menggunakan metode data panel. Hasil estimasi data memberikan bukti bahwa variabel Kemiskinan berpengaruh negative dansignifikan terhadap IPM, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh postif dan signifikan terhadap IPM, serta belanja modal juga berpengaruh positif dan signifikan dengan elastisitas positif sebesar 0,274209 terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009.

Ginanjar Budhi Utomo (2015), melakukan penelitian mengenai faktor- faktor penetu indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Yogyakarta tahun 2004-2013. Dengan menggunakan regresi data panel hasilnya menunjukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Belanja modal tidak berpengaruh terhadap IPM.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Putu Ayu Krisna Dewi I Ketut Sutrisna (2014) yang berjudul "Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Bali tahun 2008-2012". Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel terhadap indeks pembangunan manusia.Estimasi model menggunakan metode data linier berganda.Hasil estimasi data memberikan bukti bahwa variabelKemandirian Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IPM, Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Nur Baeti (2013) yang berjudul "Pengaruh Penganguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011". Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel terhadap indeks pembangunan manusia. Estimasi model menggunakan metode data panel. Hasil estimasi data memberikan bukti bahwa variabel Pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Sunarno dan Eka R (2006) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur tingkat pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, komponen yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Menurut Mooris, keterkaitan pembangunan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) mampu mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat melalui tiga indikator : tingkat harapan hidup, angka kematian, tingkat melek huruf, dan tingkat pendapatan riil perkapita berdasarkan daya beli masing – masing negara (Lincolin, 2004,37). Pada tahun 1992 Badan Pusat Statistik mengembangkan suatu indikator kesejahteraan rakyat yang disebut indikator susenas inti (*core Susenas*), indikator tersebut adalah : Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana dan fertilasi , ekonomi, kriminalitas, perjalanan wisata, dan akses ke media massa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) mempunyai ruang lingkup yang lebih sempit, hanya mengukur sebagian dari keadaan pembangunan manusia yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli. Indikator tersebut dijadikan sebagai indikator indikator yang paling layak untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan jangka panjang (BPS-Bappenas-UNDP, 2001).

2.2.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Kuncoro, 2004). Menurut UU no.25 / 1999 pasal 6, dana perimbangan terdiri dari :

a) Bagian daerah (Dana Bagi Hasil) dari PBB, BPHTB, PPh, orang pribadi dan SDA
b) Dana Alokasi Umum (DAU)
c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dibedakan menjadi :

a) Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana bagi hasil dari perpajakan, yang terdiri dari PBB, BPHTB dan PPh
b) Dana Bagi Hasil PajakSumber Daya Alam yaitu bagi hasil yang bersumber dari SDA (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi) yang terdiri dari Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent dan penerimaan dari uang eksplorasi

2) Dana Alokasi Umum (Block Grants)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini sering disebut bantuan tak bersyarat *(unconditional grants)* karena merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Abdul Halim dan Ibnu Mujib (2009), menerangkan bahwa Dana alokasi umum ini dialokasikan berdasarkan suatu rumus yang memasukkan unsur potensi penerimaan daerah dan kebutuhan objektif pengeluaran daerah dan dengan memperhatikan ketersediaan dana APBN

3) Dana Alokasi Khusus (*Special Grants*)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. Dana Alokasi Khusus dapat juga disebut dana infrastuktur karena merupakan belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Namun dalam keadaan tertentu, DAK dapat juga membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas. Menurut Adisasmita (2014), yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah:

a) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, misalnya :

- Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain.
- Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
- Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
- Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah pesisir/kepulauan.
- Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

b) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional yang meliputi:

- Kebutuhan yang sesuai dengan kegiatan yang menjadi komitmen pemerintah dengan lembaga donor.
- Kebutuhan yang sesuai dengan kegiatan yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Tahunan.

2.2.3. Belanja modal

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan, 2006). Alokasi dana oleh pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal dalam APBD bertujuan untuk meningkatkan investasi modal dalam bentuk aset tetap yaitu

peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaantugas pemerintah maupun fasilitas publik. Peningkatan fasilitas layanan publik secara simultan akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat karena alokasi belanja untuk sarana pendidikan dan kesejahteraan juga akan bertambah.

Sedangkan menurut Peraturan Mentri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainanya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akutansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Asset tetap tersebut dipergunakan untuk oprasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Indikator belanja modal dapat dilihat dalam ringkaan dibawah ini :

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Asset Tetap Lainnya.

2.2.4. Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Tavip A. Rayanto (2002) jumlah nilah tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit aa jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi di suatu daerah pada

saaat periode terntentu. Secara kuantitatif merupakan nilai barang dan jasa yang dihitung atas dasar harga berlaku (*at current price*) dan atas dasar harga konstan (*at constant price*). PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengukur besarn pembangunan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi , sementara PDRB atas dasar harga konstan digunakan sebagai tolak ukur pertumbuhnan ekonomi riil atau perubahan volume produksi.

PDRB sebagai neraca regional dimana ukurannya dapat dipisahkan sebagai PDRB sektoral pada sisi kiri dan PDRB menurut penggunaan pada sisi kanan. Manfaaat PDRB digunanakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai ukuran pendapatan perkapita, dan sebagai indikator disparitas regional. Kemampuan pengelolaan pembangunan ekonomi yang tinggi disuatu daerah akan berdampak terhadap kemakmuran masyarakat. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Nilai PDRB yang dihasilkan oleh masing–masing daerah dan tergantung pada potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan teknologi (faktor produksi) di daerah. Ditinjau dari aspek spasial, analisis antar regional akan memberikan gambaran perbedaan pola tentang hasil-hasil pembangunan ekonomi antar kabupaten.

Penyebab perbedaan tersebut adalah perbedaaan kepemilikan sumber daya alam, kondisi infrastruktur, dan faktor produksi yang tersedia. Akibat

faktor tersebut menjadikan setiap wilayah akan menimbulkan kesenjangan daerah. Maka pemerintah menetapkan peraturan mentri dalam negri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peratauran pemerintah nomor 8 tanun 2008 tebtanf tahapan, tata cara penyusunan, pengdalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Data PDRB dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu :

1. pendekatan Produksi

   Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit/ekonomi dalam suatu daerah pada suatu periode tertentu. Dikelompokkan menjadi 9 sektor, yaitu : a. pertanian, b, Pertambangan, c. Kontruksi, d. Listrik, Gas dan Air Bersih, e. Konstruksi, d. perdagangan, Hotel, dan Restoran, f. pengangkutan dan Komunikasi, g. keuangan , *Real Estate*, dan Jasa Perusahaan, h. jasa – jasa.

2. Pendekatan pengeluaran

   Menurut pendekatan pengeluaran PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Komponen permintaan akhir meliputi : pengeluaran kosumsi rumah tangga, pengeluaran kosumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran kosumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, dan perubahan inventori/stok, dan ekspor neto.

3. Pendekatan pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor–faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu daerah pada jangka waktu tertentu. Komponen balas jasa faktor produksi, yaitu : upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

Serata turunan produk doestik regional bruto (PDRB), yaitu :

a) PDRB atas dasar harga pasar

Yaitu jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi disuatu daerah termasuk penyusutan dan pajak tidak langsung

b) Produk Domestik Regional Neto (PDRN)

PDRN atas dasar harga merupakan PDRB atas dasar harga pasar dikurangi dengan penyusutan, penyusutan yang dimaksud adalah nilai susutnya barang-barang modal tetap yang digunakan dalam periode tertentu.

c) PDRN atas dasar biaya faktor

Adalah PDRN atas dasar harga pasar dikurangi pajak tidak langsung neto, pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah.

d) PDRB perkapita

PDRB perkapita adalah PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Terdapat dua ukuran PDRB perkapita, PDRB per

kapita atas dasar harga berlaku (nominal) dan PDRB atas dasar harga konstan (riil)

2.2.5. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa " Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ". Menurut Warsito (2001) dalam damang (2011) pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah". Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005) dalam damang (2001) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan asli yang bersumber dari hasil pajak daerah , hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain–lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Berdasarkan Undang - Undang nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak daerah, pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak, yaitu iuran wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah,

2. Retribusi daerah, Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendekaan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dirinci menjadi:

   a) Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas: (1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (2) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air, (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

   b) Jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak initerdiri atas: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, (7) Pajak Parkir.

   c) Retribusi. Retribusi ini dirincimenjadi: (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha, (3) RetribusiPerijinan Tertentu.

3. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagaicara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber

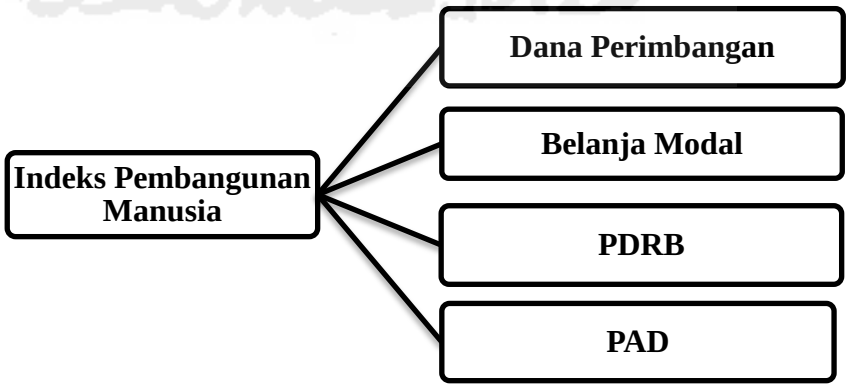
pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah..

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah yang mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahanjasa. Penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro dan bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian dalam studi ini menjelaskan bahwa Indek Pembangunan Manusia dipengaruhi beberapa variabel diantara , yaitu:

Gambar 2.1



Untuk mengetahui variabel apa saja yang berpengaruh terhadap indek pembangunan manusia, maka perlu dicari faktor-faktor yang mempengaruhi IPM Kabupaten/kota Provinsi DIY. Pada penelitian ini, faktor yang mempengaruhi IPM kabupaten/kota provinsi di DIY antara lain :Dana Perimbangan, Belanja Modal, PDRB, PAD. Dengan mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi IPM kabupaten/kota provinsi DIY, maka dapat membantu pemerintah provinsi jawa tengah dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan IPM kabupaten/kota di DIY.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan berbagai landasan teori yang di kemukakan, adalah merupakan salah satu kesimpulan dan argumentasi yang sifatnya sementara benar, sehingga dalam hal ini membutuhkan data-data hasil penelitian agar dapat dicari kebernarannya dan ditarik konsekuensi logis. Dalam penjelasan dapat dibuat beberapa hipotesis yang menjadi landasan dalam penelitian :

1) Diduga Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembanguanan Manusia (IPM)
2) Diduga Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembanguanan Manusia (IPM)
3) Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap Indeks Pembanguanan Manusia (IPM)
4) Diduga PAD berpengaruh positif terhadap Indeks Pembanguanan Manusia (IPM).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Variabel penelitian dan Definisi Operasional

Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian, diperlukan beberapa variabel yang perlu diteliti.Variabel penelitian tersebut terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat variabel independen yang terdiri dari Dana Perimbangan, Belanja Modal, PDRB dan Kemiskinan Sedangkan variael dependen menggunakan IPM.

3.1.1. Variabel Dependen (Y)

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan bahwa daerah tersebut tingkat kesejahteraan masyarakatnya cukup baik. Data ini diambil di 5 (lima) kabupaten /kota provinsi DIY yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia provinsi DIY periode Tahun 2008–2013 setiap kabupaten/kota mengalami peningkatan, namun masih terdapat daerah yang mengalami tingkat IPM yang terendah dibanding wilayah lain. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan menggunakan data panel dari tahun 2008-2013. Dalam penelitian ini satuan data IPM adalah dalam persen. Semakin tinggi angka indeks pembangunan manusia, maka kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup akan semakin tinggi.

3.1.2. Variabel Independen (X)

Dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel dependen diantara yaitu :

1. Dana Perimbangan (X1)

   Dana perimbangan adalah jumlah realisasi dana transfer yang diterima oleh kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari pemerintah pusat setiaptahunnya untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, selama tahun 2008 – 2013. Dalam penelitian ini satuan dana perimbangan adalah dalam juta rupiah.

2. Belanja Modal (X2)

   Belanja modal adalah realisasi belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Dalampenelitian ini satuan Belanja Modal adalah dalam juta rupiah.

3. PDRB (X3)

   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam melaksanakan program kegiatan pemerintah daerah di indonesia dalam periode tahun 2008-2013 diukur secara satuan juta rupiah.

4. PAD (X4)

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah yang dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah (BUMD), dan lain-lain PAD yang sah. Dalam penelitian ini satuan PAD adalah dalam juta rupiah.

3.2 Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini penulis menyiapkan populasi dari seluruh kabupaten/kota di DIY, teknik yang diigunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini berdasarkan pertimbangan yaitu sampling purposive. Sampel yang digunakan adalah 5 (lima) kabupaten/kota,karena kabupaten/kota secara keseluruhan bertanggung jawab atas laporan anggaran setiap pemerintah dalam menjalankan program pemerintah terhadapa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

3.2 Metode Analisis Data

3.2.1 Data Panel

Data panel adalah data regresi penggabungan data time series dan cross section. Data time series merupakan data yang disusun berdasarkan urutan waktu, seperti data harian, bulanan, kuartal atau tahunan. Sedangkan data cross section merupakan data yang dikumpulkan pada waktu yang sama dari beberapa daerah, perusahaan atau perorangan. Penggabungan kedua jenis data dapat dilihat bahwa variabel tarikat terdiri dari beberapa daerah

(cross section) namun dalam berbagai periode waktu (time series), runtut waktu yang membahas sekumpulan observasi dalam rentang waktu yang ditentukan, (Widarjono, 2013 , hal.229).

3.3 Model Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk mengukur pengaruh yang merupakan gabungan dua time series dan cross section sehingga mampu menyediakan data yang lebih banyak dan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Selanjutnya penggabungan itu informasi data dari time series dan cross section. Dengan menggunakan bantuan program *Eviews 9.1*. Data dalam penelitian ini menggunakan jenis data panel, sedangkan variabel independen yaitu Dana Perimbangan, Belanja Modal, PDRB dan Kemiskinan.Variabel dependen yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Model yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, adalah :

$$(IPM_{it}) = f\{DP_{it}+BM_{it}+PDRB_{it}+PAD_{t}\}$$

$$Y_{it}: \alpha + \beta_1 X_{1\,it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y = Ideks Pembangunan Manusia kabupaten/kota Provinsi DIY periode 2008 – 2013 (Persen)

X1 = Dana Perimbangan (Juta Rupiah)

X2 = Belanja Modal (JutaRupiah)

X3 = PDRB (Rupiah)

X4 = PAD (Ribu Rupiah)

α = Konstanta

$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$= Koefesien Regresi

i : Kabupaten/Kota

t : Waktu (tahun)

Selanjutnya persamaan regresi tersebut akan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan data dengan variabel dependen (Y) yang dipengaruhi oleh beberapa variabel independen (X1, X2, X3, X4) yang digunakan dalam penelitian ini.

3.3.1 Estimasi Regresi Data Panel

1. Common Efect

Tujuan dari metode ini Model Regresi *Common Effect* merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel, hanya dengan menggabungkan data cross section dan time series tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, maka model dapat diestimasi dangan metode *Ordinary Least Square* (*OLS*) (Widarjono,2013:231). Hasil regresi menunjukkan ketika terjadi kenaikan koefesien secara statistic uji *t* pada α =1% maka keseluruhan menyangkut uji *F*. Jika harga saham naik 1% maka nilai Y akan naik dan faktor lain diasumsikan tetap.

2. Fixed Efect

Model ini mangamsusikan bahwa perbedaaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel

model *Fixed Effect* menggunakan teknik varianbel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan intensif. Namun demikian slopnya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Hasil regresi metode *fixed effect* berhubungan terhadap variabel X_1 dan variabel X_2 bertanda positif sesuai hipotesis dan secara statistic signifikan melalui uji *t* pada $\alpha = 1\%$ semua variabel bertanda negative dan secar statistic juga signifikan. Signifikan terhadap variabel dummy menunjukkan bahwa intersep antara variabel X1, X2, X3,X … dapat berbeda. Dengan demikian model *fixed effect* mampu menjelaskan adanya perbedaan prilaku diatas.

3. Random Effect

Model ini akan mengstimasi data panel dimana variabel ganggaun mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.pada model *Random Effect* perbedaan intesep di akomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan model *Random Effect* yakni menghilangkan heterokedasititas. Model ini juga disebut dengan *Error Component* (ECM) atau teknik *Generlized Least Square*(GLS). Jika nilai koofesien untuk variabel X1 = 0,6084 dab X2 = 0,3419 Ssecara statistic signifikan pada α=1% artinya X2 berpengaruh positif terhadap Y. Kalau nilai koofesien tersebut juga tidak jauh berbeda dengan metode *Fixed Effect.* Jika intersep (c) -1,185 merupakan nilai rata-ratadari

komponen kesalahan random (*random error component*) dan nialai *randomefffect* menunjukkan besar perbedaan komponen kesalahan random *coefficient* terhadap nilai intersepsemua *coefecient* rata-rata

3.4 Uji Kesesuaian Model

Untuk menguji kesesuaian atau kebaikan model dari ketiga model pada teknik estimasi model dengan data panel digunakan chow Test dan Hausman Test. Chow Test digunakan untuk menguji kesesuaian model antara model yang diperoleh daro data pooled least square dengan model yang diperoleh dari hasil Chow Test dengan model yang diperoleh dari effect

3.4.1 Uji Chow

Chow test menyebutkan sebagai pengujian F-statistik adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan Pooled Least Square atau Fixed Effect. Sebagaimana yang diketahui bahwa terkadang asumsi bahwa setiap unit cross section memiliki pelaku yang sama cenderung tidak realistis mengingat dimungkinkan setiap unit cross section memiliki pelaku yang berbeda. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut.

H0 : Model Pooled Test Square

H1 : Model Fixed Effect

Dasar penolakan terhadap hopotesa nol (H0) adalah dengan mengguanakan F-statistik seperti yang dirumuskan oleh Chow :

$$F = \frac{(RSS_1 - RSS_2)/m}{(RSS_2)/(n-k)}$$

Dimana :

RSS_1 = Resedual Sum Square hasil pendugaan model Fixed effect

RSS_2 = Residual Sum Square hasil pendugaan Pooled Least Square

n = jumlah data cross section

m = jumlah data time series

k = jumlah variabel penjelas

Statistik Chow mengikuti distribusi F-statistik dengan derajat bebas (m, n, k) jika nilai Chow statistik (F-stat) hasil pengujian lebih besar dari F-tabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hpppotesa Nol sehingga model yang digunakan adalah model fixed effect, dan begitu juga sebaliknya.

3.4.2 Uji Hausman

Hausman Test adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan dalam memilih apakah menggunakan model fixed effect atau model random effect. Seperti apakah yang diketahuhai bahwa pengguanaan model fixed effect mengandung suatu unsure trade-off yaitu derajat bebas memasukkan variabel dummy. Namun, penggunaan metode random effect juga harus memperhatikan ketiadaan pelanggaran asumsi dari setiap komponen galat. Hausman Test dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

H0 : Model Random Effect

H1 : Model Fixed Effect

Sebagai dasar penolakan hipotesa nol maka digunakan Ststistik Hausman dan membandingkan dengan *Chi-Square.* Statistik uji hausman ini mengikuti distribusi statistic *Chi-Square* dengan *degree of freedom* sebanyak *k* adalah jumlah variabel independen. Jika menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *fixed Effect* sedangkan sebaliknya bila kita gagal menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang bisa digunakan random effect, (Widarjono,2013, 365).

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

Pada bab ini akan diuraikan data-data yang digunakan dalam bentuk deskripsi data. Kemudian dari data yang ada, diperoleh hasil analisis dengan menggunakan beberapa alat analisis, antara lain : analisis regresi data panel, uji statistik.

4.1 Analisis Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder selama 6 tahun dari 2008-2013 yang diambil dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen (penjelas) berpengaruh terhadap variabel dependen (yang dijelaskan).

Data-data yang termasuk variabel dependen (terikat) yaitu IPM Kabupaten/Kota. Data ini diperoleh dari buku DIY dalam angka dan statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota DIY dari berbagai edisi yang di terbitkan oleh Badan Pusat Statistik DIY yang dinyatakan dalam persen selama kurun waktu 2008-2013.

Tabel 4.1

Tingakat Presentase Indeks Pembangunan Manusia di 5 (Lima) Kabupaten/kota Tertinggi di DIY di 6 (Lima) tahun terakhir Periode 2008-2013

N0	Kab/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kota Yogyakarta	78,95	79,28	79,52	79,89	80,24	80,51
2	Sleman	77,24	77,07	78,02	78,79	79,39	79,97
3	Kulon Progo	73,26	73,77	74,49	75,04	75,33	75,95
4	Bantul	73,38	73,75	74,53	75,05	75,51	76,01
5	Gunung Kidul	70,00	70,17	70,45	70,84	71,11	71,64

Sumber : BPS, DIY Dalam Angka

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa presentasi tingkat tertinggi dan terendah IPM di masing – masing kabupaten/kota di DIY sangat berbeda. Hal ini ditunjukkan pada perbedaan disetiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Kota Yogyakarta memperoleh angka IPM yang tertinggi, ini merupakan bahwa letak daerah akan mempengaruhi peningkatan IPM. Namun berbeda dengan daerah Gunung Kidul yang memperoleh hasil IPM terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di DIY yang setiap tahunnya miningkat, peningkatan presentasi IPM Gunung Kidul hanya sedikit meningkat namun konstan. Hal ini dikarenakan pemerintah Gunung Kidul mulai meningkatkan fasilitas guna meningkatkan kualitas Sumber daya manusianya, melihat Gunung Kidul merupakan daerah yang lokasi pariwisatanya cukup banyak.

Tabel 4.2

Tingakat Dana Perimbangan Di 5 (Lima) Kabupaten/kota DIY Tertinggi di DIY (Juta Rupiah) di 6 (Enam) tahun terakhir Periode 2008-2013

N0	Kab/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Sleman	688941.48	717703.17	740198.03	753889.01	946821.05	992782.43
2	Bantul	679250.09	668488.99	688676.57	717123.25	885352.41	938492.08
3	Kulon Progo	478584.76	494268.84	485094.13	522276.92	612419.55	681454.83
4	Kota Yogyakarta	504741.15	517366.88	484628.28	500613.75	602310.07	658770.84
5	Gunung Kidul	591432.83	609362.84	633692.37	667004.72	799932.05	877414.79

Sumber: BPS, DIY Dalam Angka Berbagai Tahun

Berdasarkan tabel diatas dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan untuk meningkatkan kualitas masyarakat daerah, dari kelima kabupaten diatas kabupaten Sleman adalah kabupaten yang memperoleh transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp 992782.43 juta rupiah meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel 4.3

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja
Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

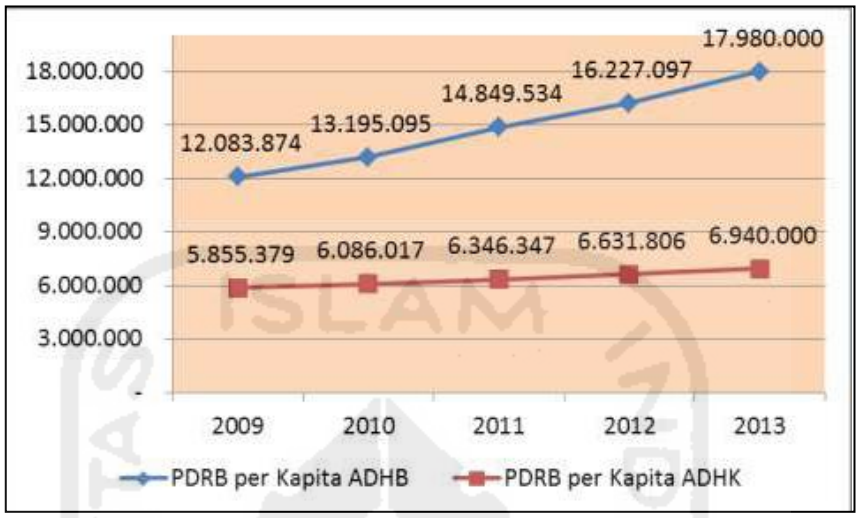
Pemerintah Daerah	Presentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan	Presentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja
Kota Yogyakarta	**29,25**	**31,07**
Kulon Progo	**9,57**	**9,95**
Bantul	**14,75**	**16,16**
Gunung Kidul	**6,72**	**7,07**
Sleman	**23,65**	**26,53**

Sumber : DIY Dalam Angka

Besaran sumbangan PAD terhadap pendapatan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 terlihat masih kecil. Dari lima kabupaten/ kota di D.I. Yogyakarta, hanya ada tiga kabupaten/kota yang sumbangan PAD-nya di atas 10 persen, yakni Kota Yogyakarta dengan sumbangan PAD sebesar 29,25 persen, Kabupaten Sleman sebesar 23,65 persen dan Kabupaten Bantul sebesar 14,75 persen. Sumbangan PAD Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul terhadap total pendapatan masih relatif kecil (di bawah 10 persen).

Gambar 4.1

Nilai PDRB per Kapita DIY (rupiah), 2009-2013



Sumber: BPS Provinsi DIY

Sementara itu jika dilihat menurut kabupaten/kota besarnya pendapatan perkapita di Provinsi DIY dari tahun 2008 hingga 2013 terus mengalami kenaikan. Pendapatan perkapita paling rendah berturut-turut terjadi pada Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan terbesar dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Berikut adalah nilai pendapatan perkapita kabupaten/kota di Provinsi DIY berdasarkan harga konstan tahun 2000.

Tabel 4.4

Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota Di DIY

Atas Dasar Harga Konstan 2000

Tahun 2008-2013 (Rp)

Tahun	Bantul	Gunung Kidul	Kulon Progo	Sleman	Kota Yogyakarta
2008	3976712.00	4470621.00	4435553.00	5612511.00	10989241.00
2009	4203156.00	4733514.00	4609219.00	5675733.00	13459208.00
2010	4353170.00	4930661.00	4580532.00	5830337.00	14167677.00
2011	4534212.00	5124333.00	4790630.00	6054435.00	14893159.00
2012	4741941.00	5319628.00	4992181.00	6341065.00	15612923.00
2013	5046587.00	5667516.00	5261787.00	6867959.00	16646901.00

Sumber: BPS, DIY Dalam Angka Berbagai Tahun

Angka IPM DIY merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untukmelihat kualitas penduduk DIY. IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial yang diukur dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Angka harapan hidup DIY cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakinbaik.

Data variabel independen (bebas) adalah Dana Perimbangan (DP), Belanja Modal (BM), Pendapatan Perkapita (PDRB), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dilakukan pengujian model dengan metode estimasi data panel. Berikut merupakan hasil regresi data panel dengan tiga pendekatan yaitu *Common Effect Model, Fixed Effect Model,* dan *Random Effect Model*.

Melalui ketiga jenis data diatas, pendekatan yang digunakan dalam model adalah salah satu model terbaik dari model *commom, fixed, random.*Untuk mendapatkan model yang terbaik dilakukan uji signifikan model uji chow dan huasman

4.2 Pemilihan Model Regresi

Karena data yang dianalisis merupakan data panel, maka harus ditentukan metode pendekatan analisis panel data yang diuji adalah pendekatan *common effect*, pendekatan efek tetap (*fixed effect*) dan pendekatan efek acak (*random effect*). Melalui uji Chow untuk memilih antara pendekatan *common effect* atau pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan uji Hausman untuk memilih antara pendekatan efek tetap (*fixed effect*) atau efek acak (*random effect*) sehingga pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan efek tetap (*fixed effect*).

4.3 *Likelihood Ratio Test (Chow Test)*

Likelihood ratio test dilakukan untuk mengetahui apakah model yang lebih baik untuk digunakan adalah pendekatan *commoneffect* atau pendekatan efek tetap (*fixed effect*). Uji ini dilakukan dengan prosedur uji F-statistik dengan hipotesis :

> *H_0: Common Effect Model*lebih baik daripada *Fixed Effect Model.*
>
> *H_1: Fixed Effect Model* lebih baik daripada *Common Effect Model.*
>
> Hasil *Likelihood ratio test* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5

Hasil Pengujian *Likelihood Ratio Test*

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	101.014487	(4,21)	0.0000
Cross-section Chi-square	90.231092	4	0.0000

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews v.09, 2015.

Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh angka probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000 dengan demikian maka diketahui bahwa nilai p-value lebih kecil dari α (0,05), sehingga kesimpulan dari hasil uji *Chow* adalah menolak H_0, sehingga model *Fixed Effect Model* lebih baik untuk digunakan. Selanjutnya akan di uji melalui uji Hausman

4.4 Uji hausman

Hausman test digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pengujian ini mengikuti distribusi *chi-square* dengan hipotesis :

H_0: Random Effect Model lebih baik daripada *Fixed Effect Model.*

H_1: Fixed Effect Model lebih baik daripada *Random Effect Model.*

Hasil pengujian *Hausman Test* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6

Hasil Pengujian *Hausman Tes*t

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test period random effects			
Test Summary	Chi-Sq. tatistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	51.023715	4	0.0000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews v.6, 2015.

Dari uji signifikan (Uji Chow dan Hausman) didapatkan model yang terbaik yakni model *fixed effect*, sehingga model dengan jenis pendekatan *fixed* layak sebagai pengujian model sebgai berikut :

4.5 Estimasi Fixed Effect Model

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Sehingga diperoleh hasil seperti tabel berikut :

Tabel 4.7

Estimasi Output Hasil Reg resi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: IPM				
Method: Panel Least Squares				
Date: 09/18/16 Time: 23:11				
Sample: 2008 2013				
Periods included: 6				
Cross-sections included: 5				
Total panel (balanced) observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7087.730	111.6478	63.48293	0.0000
DP	0.000650	0.000139	4.684559	0.0001
BM	-0.000365	0.000193	-1.892135	0.0723
PDRB	6.42E-06	1.37E-05	0.467885	0.6447
PAD	2.70E-07	2.38E-07	1.130765	0.2709
Kota Yogyakarta	409.9141			
Kulon Progo	8.912330			
Bantul	-116.4588			
Gunung Kidul	-473.8340			
Sleman	171.4664			
	Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.988554	Mean dependent var		7563.833
Adjusted R-squared	0.984193	S.D. dependent var		334.7051
S.E. of regression	42.08067	Akaike info criterion		10.56038
Sum squared resid	37186.44	Schwarz criterion		10.98074
Log likelihood	-149.4057	Hannan-Quinn criter.		10.69486
F-statistic	226.7085	Durbin-Watson stat		1.314278
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews v.09, 2015.

Dari hasil regresi panel data dengan fexed effect , diperoleh hasil sebagai berikut :

$$Yi = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e_i$$

$$(IPM_{it}) = 7087.730 + 0.000650(DP_{it}) - 0.000365(BM_{it}) + 6.420000(PDRB_{it}) + 2.700000(PAD_{it})$$

$R^2 = 0.988554$ N = 30 F –sat = 226.7085

Dari hasil pengolahan regresi data panel dengan metode *Fixed Effect Model* diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R-squared) dari

hasil estimasi sebesar 0.988554, yang menunjukan variabel-variabel indepanden mampu menjelaskan 98,86% terhadap variabel dependen. Hasil estimasi menunjukan adanya individu dari data *cross section*(kabupaten/kota) pada konstanta model penelitian.

4.6 Analisis Hasil Regresi

4.6.1 *Fixed Effect Model*

Berdasarkan table hasil dari *fixed effect model* dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan, ditandai dengan nilai t-tabel > t hitung sebesar (1,964663 < 4.684559), bahwa kenaikan Dana Perimbangan Rp 1 juta rupiah akan menaikkan indeks pembangunan manusia sebesar 0.000650%. Variabel belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan dengan mengunakan α 10% dengan melihat nilai t table > t hitung sebesar (1.964663 > -1.892135), bahwa kenaikan belanja modal justru akan menurunkan IPM sebesar -0.000365. variabel PDRB tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap IPM dengan nilai (1.964663 < 6.42E-06) mengindikasikan bahwa tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara PDRB dengan variabel depeneden. Variabel PAD tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap IPM di tandai dengan (1.964663 < 1.130765) artinya tidak adanya pengaruuh antara PAD dengan IPM.

Dari hasil uji *fixed effect model* diatas dapat dilihat bahwa masing – masing dari variabel independen mempunyai pengaruh yang berbeda. Hal

ini menunjukan bahwa model fixed effect mampu menjelaskan adanya perbedaan prilaku di lima kabupaten/kota tersebut.

4.6.2 Uji F (Uji secara menyeluruh)

Table 4.8

Hasil uji F dari estimasi *fixed effect*

R-squared	0.988554
Adjusted R-squared	0.984193
S.E. of regression	42.08067
Sum squared resid	37186.44
Log likelihood	-149.4057
F-statistic	226.7085
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber *Olahan Evews 9*

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel- variabel independen bersama – sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak.Fhitung (F- statistic) dalam perhitungan menggunakan *E-Views* 0.9 sebesar 226.7085 dan probabilitas sebesar 0.000000 (>5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara estimasi *fixed effect,* variabel independen bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen.

4.6.2 Koefesien determinasi (R^2)

Tabel 4.9

Hasil koefesien determinasi berdasarkan estimasi *fixed effect*

R-squared	0.988554
Adjusted R-squared	0.984193
S.E. of regression	42.08067
Sum squared resid	37186.44
Log likelihood	-149.4057
F-statistic	226.7085
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber *Olahan Evews 0.9*

Koefesien determinasi (R2) adalah sesuatu yang menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen Y dapat di jelaskan oleh variabel – variabel independen X1, X2, X3, X4. Pada model estimasi fixed effect, R^2 sebesar 0.988554 sehingga variasi tingkat IPM dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, X3, X4 sebesar 99% dan sisanya 1 % dijelaskan oleh variabel lain.

4.7 Intepretasi Hasil Penelitian

4.7.1 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan di Kabupaten/kota DIY berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya apabila Dana perimbangan di kabupaten/kota di DIY meningkat sebesar 1.000.000 rupiah maka akan

meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,000650 rupiah. Hal ini sejalan dengan tegaskan oleh (Kuncoro,2004), Bahwa tujuan dari dana perimbangan adalah untuk dialokasikan kepada daerah yang membutuhkan dalam rangka desentralisasi atau otonomi daerah. Sehingga penggunaan dana perimbangan ini bias digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM.

4.7.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan. Yang berarti kenaikkan belanja modal sebesar 1.000.000 rupiah justru akan menurunkan tingkat IPM di kabupaten/kota DIY sebesar -0,000365 rupiah. Hal ini dikarenakan presentase dana yang diberikan kurang mendukung untuk peningkatan pembangunan manusia di kabupate/kota DIY. Hal ini bertolak dengan apa yang ditegaskan oleh (Nordiawan, 2006). Bahwa alokasi dana oleh pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal dalam APBD bertujuan untuk meningkatkan investasi modal dalam bentuk aset tetap yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

4.7.3 Analisis PDRB Terhadap Indeks Pebangunan Manusia

Dari hasil penelitian yang menggunakan variabel PDRB sebagai variabel independen dan IPM sebagai variabel dependen diperoleh hasil analisis bahwa PDRB tidak berpengaruh dan tidak signifikan, Hal ini dikarenakan pendapatan perkapita pada Kabupaten/kota DIY tidak

mendukung untuk meningkatkan IPM, IPM merupakan salah satu indikator untuk mengukur suatu pembangunan daerah yang berdasarkan tipologinya yogyakarta merupakan daerah yang berkembang cepat, pertumbuhannyapun sangat tinggi akan tetapi tingakat pendapatan perkapitanya rendah.

4.7.4 Analisis PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil penelitian ini bahwa PAD tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Kontribusi pendapatan asli daerah untuk membiayai setiap daerahnya tidak mendukung terhadap pembangunan manusia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ". Seperti yang ditegaskan oleh Warsito (2001) dalam Damang (2011) pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Tabel 4.10

Tabel Perbedaan Koefesien Kabupaten/Kota DIY

Sudah Diurutkan				
No	Kabupaten/Kota	Koefesien Umum	*Intersep*	Koefesien Kabupaten/kota
1	_Kota Yogyakarta_C	7087.730	409.9141	7497.64
2	_Kulon Progo_C	7087.730	8.912330	7096.642
3	_Bantul_C	7087.730	-116.4588	6971.271
4	_Gunung Kidul_C	7087.730	-473.8340	6613.896
5	_Sleman_C	7087.730	171.4664	7259.196

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews v.09, 2015.

Jika di lihat pada tabel 4.10 terdapat hasil dari olah data yang telah dilakukan dengan menggunakan program eviews, maka dapat diketahui perbedaan dari 5 (lima) kabupaten/kota dengan melihat intersep dari masing-masing Kabupaten/kota DIY. Nilai koefesien diantaranya sebagai berikut :

1._Kota Yogyakarta_C = 7497.64 menunjukkan pengeluaran pemerintah daearah Kota Yogyakarta pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten/kota nol adalah sebesar 7497.64 ribu rupiah

2._Kulon Progo_C = 7096.642 menunjukkan pengeluaran pemerintah daearah kabupaten Kulon Progo pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten/kota nol adalah sebesar 7096.642 ribu rupiah.

3._Bantul_C = 6971.271 menunjukkan pengeluaran pemerintah daearah kabupaten Bantul pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten/kota nol adalah sebesar 6971.271 ribu rupiah.

4._Gunung Kidul_C = 6613.896 menunjukkan pengeluaran pemerintah daearah kabupaten Gunung Kidul pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten/kota nol adalah sebesar 6613.896 ribu rupiah.

5.n_Sleman_C = 7259.196 menunjukkan pengeluaran pemerintah daearah kabupaten Sleman pada saat variabel-variabel independen dan semua kabupaten/kota nol adalah sebesar 7259.196 ribu rupiah.

BAB V

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah terhadap indeks pembanguunan manusia. Teknik yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan data panel dengan pendekatan pemilhan model *fixed effect model*. Variabel yang digunakan ialah indeks pembangunan manusia sebagai variabel dependen. Sedangakan variabel independennya merupakan Dana perimbangan. Belanja modal, PDRB dan pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota DIY dalam kurun waktu 2008 -2013. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/kota DIY . Artinya apabila terjadi peningkatan dana perimbangan maka akan meningkatkan IPM. IPM yang terdiri dari tiga indikator yaitu angka melek huruf, angka harapan hidun, dan standar hidup yang layak, sehingga dengan adanya sumber alokasi dana yang besar melalui dana perimbangan akan mempermudah dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Variabel belanja modal berpengaruh negatif. Yang artinya bahwa peningkatan belanja modal justru akan menurunkan IPM di Kabupaten/kota DIY . hal ini dikarenakan alokasi belanja modal yang

kurang tepat. Beberapa faktor yang menyebabkan belanja modal negatif yaitu : perluasan kesempatan pemerataan pendidikan, Pada pemerataan pendidikan orientasi penganggaran pendidikan akan lebih banyak pada peningkatan daya tampung pendidikan, sehingga dimungkinkan penambahan gedung sekolah dan ruang kelas baru, bantuan khusus murid (BKM), bantuan khusus sekolah (BKS). Kedua, peningkatan tidak didukung dengan penganggaran berupa anggaran untuk pembinaan profesi guru, penambahan alat-alat dan buku pelajaran, manajemen berbasis sekolah, pelatihan berbasis kompetensi. Ketiga , kurangya efisensi dalam pengelolaan pendidikan, Hal ini perlu dibangun terus menerus dengan bentuk kegiatan seperti pemetaan kembali sekolah, pengembangan sistem informasi manajemen, pendidikan kedisiplinan dalam pengelolaan pendidikan, pemanfaatan sumberdaya pendidikan seoptimal mungkin, membangun etos kerja, profesionalisme dalam manajemen.

3. Variabel PDRB tidak berpengaruh terhadapa IPM di kabupaten/kota DIY, dikarenakan alokasi pendapatan perkapita tidak dialokasikan secara optimala untuk pembanguanan manusia. Hal ini dikarenakan pendapatan perkapita pada Kabupaten/kota DIY tidak mendukung untuk meningkatkan IPM, IPM merupakan salah satu indikator untuk mengukur suatu pembangunan daerah, berdasarkan tipologinya, Yogyakarta merupakan daerah yang berkembang cepat,

pertumbuhannyapun sangat tinggi akan tetapi tingakat pendapatan perkapitanya rendah.

4. Variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadapa IPM. Hal ini juga dikarenakan kontribusi PAD untuk mendukung pembangunan daerah hanya 20%, kurangnya anggran maka akan berpengaruh terhadap fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat, dengan begitu dampaknya akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia.

5.2 Keterbatas Penelitian

Penelitian ini telah membuktikan secara empiris terkait pengaruh Produk Domestik Regional Bruto , Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia, khususnya pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Namun penelitian ini masih terdapat keterbatasan antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian ini mencoba menganilisi komponen APBD namun hanya terbatas pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Aloksi Umum dan Dana Alokasi Khusus sehingga untuk penelitian selanjutnya sebaiknya ditambah dengan variabel lain yang berasal dari komponen APBD untuk dapat memberikan model penelitian yang lebih baik.

5.3 Saran

5.3.1 Saran untuk pemerintah

Pemerintah diharapkan mampu untuk meningkatkan presentasi dana untuk pembangunan fasilitas publik daerah guna mendukung segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatakan kualitas sumber daya manusia, dengan begitu akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat tiap daerah.

5.3.2 Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini baru menggunakan sebagian kecil dari komponen APBD, sehingga dalam penelitian selanjutnya diharap dapat menambah variabel lain dalam komponen APBD untuk mengetahui peran pendanaan daerah dalam meningkatkan IPM.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad Licollin 2004. Ekonomi Pembangunan. Edisi ke4, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.

Baeti, Nur 2013."*Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011*". Economics Development analysis Journal Vol. 2, No. 3.

Badan Pusat Statistika, (2007-2008), "*Indeks Pembangunan Manusia*", Katalog Badan Pusat Statistika, Jakarta-Indonesia

Badan Pusat Statistika, 2010. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Daerah Istimewa.* Yogyakarta : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta.

Firmansah, Nizar 2015. "*Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2009-2013*". Skripsi. Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Halim, A., Mujib, I. 2009. "*Problem Desentralisasi Dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah*". Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.

Kuncoro, Haryo. 2007. "*Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Simposium Nasional Akutansi X.

Kuncoro, Mudrajad (2004), " Otonomi Dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi, Dan Peluang", Erlangga, Jakarta.

Lugastoro, D.P. 2013. "*analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur*".Ilmu Ekonomi Fakultas Dan Bisnis Brawijaya Malang.

Mirza, D.S. 2012. "*Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009*". Economics Development analysis Journal Vol. 1, No. 1.

Nordiawan, Deddi. (2006). Akutansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta

Rayanto, T.A 2002.Anasis Produk Domestic Bruto Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2007-2011.BAPPEDA Provinsi D.I Yogyakarta.

Sutrisna, P.A.K.D.I.K. "*Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali Tahun 2008-2012*". E-Jurnal Ekonomi Pembangunan UNUD Vol. 4, No. 1, Januari 2014.

Sunarno, Eka, R. 2006. Indeks Pembangunan Manusia 2004-2005,cv. Nario Sari, Jakarta.

Setyowati, Lilis dan Suparwati, Y.K. 2012."*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah)*".Jurnal Prestasi Vol. 9, No. 1.

Todaro, Michael.P and Smith, Stephen C.(2006). Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga, Edisi 9, Erlangga, Jakarta.

Utomo, G.B. 2015."*Faktor- faktor penetu indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Yogyakarta tahun 2004-2013*" Skripsi. Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

UU No.1 Tahun 1945 tentang pembentukan komite Nasional Indonesia pusat.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah.

UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Widarjono, Agus 2013. "Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya : Disertai Panduan Eviews", UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

http://yogyakarta.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1. Diakses pada tanggal 15 September 2016 pukul 22.01 WIB

http://yogyakarta.bps.go.id/Subjek/view/id/6#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1. Diakses pada tanggal 15 September 2016 pukul 22.02 WIB

http://yogyakarta.bps.go.id/Subjek/view/id/52#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek2. Diakses pada tanggal 15 September 2016 pukul 22.04 WIB

http://yogyakarta.bps.go.id/Subjek/view/id/12#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1. Diakses pada tanggal 15 September 2016 pukul 22.17WIB

http://yogyakarta.bps.go.id/Subjek/view/id/26#subjekViewTab1|accordion daftar-subjek1. Diakses pada tanggal 15 September 2016 pukul 22.20 WIB

https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/6. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2016 pukul 11.07 WIB

http://pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/?view=v_artikel&id=15 Diakses pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 10.07 WIB

LAMPIRAN

Tabel IPM Kabupaten/Kota DIY Tahun 2008-2013 (%)

	Kab/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kota Yogyakarta	78,95	79,28	79,52	79,89	80,24	80,51
2	Sleman	77,24	77,07	78,02	78,79	79,39	79,97
3	Kulon Progo	73,26	73,77	74,49	75,04	75,33	75,95
4	Bantul	73,38	73,75	74,53	75,05	75,51	76,01
5	Gunung Kidul	70,00	70,17	70,45	70,84	71,11	71,64

Tabel Dana Perimbangan Kabupaten/Kota DIY Tahun 2008-2013

(Juta Rupiah)

N0	Kab/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Sleman	688941.48	717703.17	740198.03	753889.01	946821.05	992782.43
2	Bantul	679250.09	668488.99	688676.57	717123.25	885352.41	938492.08
3	Kulon Progo	478584.76	494268.84	485094.13	522276.92	612419.55	681454.83
4	Kota Yogyakarta	504741.15	517366.88	484628.28	500613.75	602310.07	658770.84
5	Gunung Kidul	591432.83	609362.84	633692.37	667004.72	799932.05	877414.79

Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2008-2013
(Juta rupiah)

Kab/Kota	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kota Yogyakarta	107286.6	86735.75	54040.43	59151.11	88335.89	167079.74
KulonProgo	91696.83	40810.48	46582.09	105604.89	147830.58	123313.53
Bantul	302760.37	107353.19	123249.28	119417.03	140106.75	183269.84
GunungKidul	137776.34	93848.25	47001.13	111021.47	164360.94	156373.18
Sleman	98394.14	115846.91	99812.27	96111.4	132536.25	206859.87

Tabel Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota Di DIY

Atas Dasar Harga Konstan 2000

Tahun 2008-2013 (Rupiah)

Kab/Kota	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kota Yogyakarta	10989241,00	13459208,00	14167677,00	14893159,00	15612923,00	16646901,00
KulonProgo	4435553,00	4609219,00	4580532,00	4790630,00	4992181,00	5261787,00
Bantul	3976712,00	4203156,00	4353170,00	4534212,00	4741941,00	5046587,00
GunungKidul	4470621,00	4733514,00	4930661,00	5124333,00	5319628,00	5667516,00
Sleman	5612511,00	5675733,00	5830337,00	6054435,00	6341065,00	6867959,00

PAD Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2008-2013 (Ribu rupiah)

Kab/Kota	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kota Yogyakarta	132431572	161482659	179423640	228870562	338839606	383052149
Kulon Progo	42286238	39358629	48589685	53752294	74028664	95991513
Bantul	69800762	88691363	81637009	128896456	166597778	224197864
Gunung Kidul	32907615	38455405	42542031	54462419	67050782	88427448
Sleman	140631359	157231268	163056459	226686250	301069539	449270306

Tabel Hasil Regresi

Hasil Pengujian *Likelihood Ratio Test*

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	101.014487	(4,21)	0.0000
Cross-section Chi-square	90.231092	4	0.0000

Hasil Pengujian *Hausman Tes*t

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test period random effects			
Test Summary	Chi-Sq. tatistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	51.023715	4	0.0000

Hasil Estimasi *Common Effect*

Dependent Variable: IPM				
Method: Panel Least Squares				
Date: 09/18/16 Time: 23:09				
Sample: 2008 2013				
Periods included: 6				
Cross-sections included: 5				
Total panel (balanced) observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7710.660	288.9975	26.68071	0.0000
DP	-0.000774	0.000425	-1.819291	0.0809
BM	-0.000448	0.000738	-0.606993	0.5493
PDRB	-4.34E-07	1.67E-05	-0.026020	0.9794
PAD	2.99E-06	6.33E-07	4.723025	0.0001
R-squared	0.768319	Mean dependent var		7563.833
Adjusted R-squared	0.731250	S.D. dependent var		334.7051
S.E. of regression	173.5149	Akaike info criterion		13.30142
Sum squared resid	752685.2	Schwarz criterion		13.53495
Log likelihood	-194.5212	Hannan-Quinn criter.		13.37612
F-statistic	20.72673	Durbin-Watson stat		0.393787
Prob(F-statistic)	0.000000			

Estimasi Output Hasil Regresi *Random Effect Model*

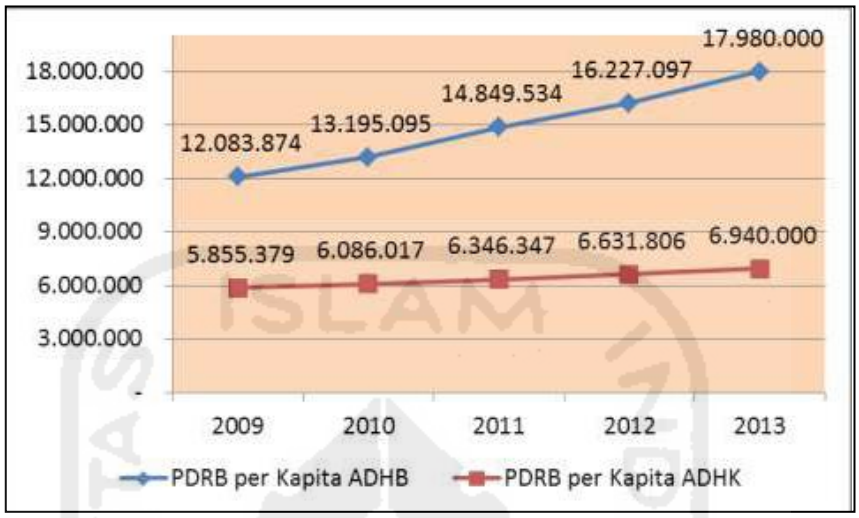
Dependent Variable: IPM				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 09/18/16 Time: 23:12				
Sample: 2008 2013				
Periods included: 6				
Cross-sections included: 5				
Total panel (balanced) observations: 30				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7710.660	70.08742	110.0149	0.0000
DP	-0.000774	0.000103	-7.501640	0.0000
BM	-0.000448	0.000179	-2.502865	0.0192
PDRB	-4.34E-07	4.05E-06	-0.107291	0.9154
PAD	2.99E-06	1.54E-07	19.47486	0.0000
Yogyakarta	409.9141			
Kulon progo	8.912330			
Bantul	-116.4588			
Gunung kidul	-473.8340			
sleman	171.4664			
	Effects Specification			
			S.D.	Rho
Cross-section random			5.07E-05	0.0000
Idiosyncratic random			42.08067	1.0000
	Weighted Statistics			
R-squared	0.768319	Mean dependent var		7563.833
Adjusted R-squared	0.731250	S.D. dependent var		334.7051
S.E. of regression	173.5149	Sum squared resid		752685.2
F-statistic	20.72673	Durbin-Watson stat		0.393787
Prob(F-statistic)	0.000000			
	Unweighted Statistics			
R-squared	0.768319	Mean dependent var		7563.833
Sum squared resid	752685.2	Durbin-Watson stat		0.393787

Estimasi Output Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: IPM				
Method: Panel Least Squares				
Date: 09/18/16 Time: 23:11				
Sample: 2008 2013				
Periods included: 6				
Cross-sections included: 5				
Total panel (balanced) observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7087.730	111.6478	63.48293	0.0000
DP	0.000650	0.000139	4.684559	0.0001
BM	-0.000365	0.000193	-1.892135	0.0723
PDRB	6.42E-06	1.37E-05	0.467885	0.6447
PAD	2.70E-07	2.38E-07	1.130765	0.2709
Kota Yogyakarta	409.9141			
Kulon Progo	8.912330			
Bantul	-116.4588			
Gunung Kidul	-473.8340			
Sleman	171.4664			
	Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.988554	Mean dependent var		7563.833
Adjusted R-squared	0.984193	S.D. dependent var		334.7051
S.E. of regression	42.08067	Akaike info criterion		10.56038
Sum squared resid	37186.44	Schwarz criterion		10.98074
Log likelihood	-149.4057	Hannan-Quinn criter.		10.69486
F-statistic	226.7085	Durbin-Watson stat		1.314278
Prob(F-statistic)	0.000000			

Gambar

Nilai PDRB per Kapita DIY (rupiah), 2009-2013



Sumber: BPS Provinsi DIY

Tabel 1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah DIY, 2010-2013 (Rp 000)

Rincian	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	621.738.060	700.339.192	800.156.498	1.014.089.544
1. Pajak Daerah	526.658.538	592.498.872	689.572.065	885.217.610
2. Retribusi Daerah	35.839.076	37.709.418	36.228.288	41.436.703
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.376.334	30.557.391	31.863.499	36.328.245
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33.864.112	39.573.511	42.492.646	51.106.986
B. Dana Perimbangan	615.334.816	714.542.343	850.513.085	961.190.992
1. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	76.479.469	74.240.415	74.403.649	98.360.324
2. Dana Alokasi Umum	527.471.247	620.812.328	757.056.696	828.334.768
3. Dana Alokasi Khusus	11.384.100	19.489.600	19.052.740	34.495.900
C. Penerimaan Lainnya yang Sah	4.056.726	4.593.565	284.778.165	311.574.558
1. Hibah	4.056.726	4.593.565	5.496.225	8.815.476
2. Dana Darurat	-	-	-	-
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	279.281.940	302.759.082
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	-	-	-	-
6. Dana Tunjangan Pendidikan	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah	**1.241.129.602**	**1.419.475.100**	**1.935.447.748**	**2.286.855.094**
A. Belanja Tidak Langsung	793.215.967	849.118.418	1.267.028.063	1.427.652.116
1. Belanja Pegawai	357.054.577	443.439.504	490.659.484	503.342.635
2. Belanja Bunga	19.464	-	-	-
3. Belanja Subsidi	-	-	-	-
4. Belanja Hibah	79.964.292	7.618.834	355.793.657	467.336.914
5. Belanja Bantuan Sosial	94.390.428	105.752.387	94.674.768	15.955.857
6. Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab/Kota dan Pemerintah Desa	195.720.206	215.127.693	251.788.474	306.120.014
7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa	60.067.000	67.180.000	54.111.680	124.470.680
8. Belanja Tidak Terduga	6.000.000	10.000.000	20.000.000	10.426.016
B. Belanja Langsung	601.230.133	741.667.293	857.260.645	1.027.267.313
1. Belanja Pegawai	91.305.152	90.164.079	111.508.041	125.019.271
2. Belanja Barang dan Jasa	378.233.586	501.329.695	527.793.940	609.742.631
3. Belanja Modal	131.691.395	150.173.519	217.958.664	292.505.411
Jumlah Belanja Daerah	**1.394.446.100**	**1.590.785.711**	**2.124.288.708**	**2.454.919.429**
Surplus/Defisit	**-153.316.498**	**-171.310.611**	**-188.840.960**	**-168.064.335**

Sumber : BKPD DIY